

## *Institutional Design: Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso*

Nabilah Khairunnisa<sup>1</sup>, Putri Robiatul Adawiyah<sup>2</sup>, Itok Wicaksono<sup>3</sup>, Baktiawan Nusanto<sup>4</sup>

<sup>123</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

[nabilahkhairunnisalala@gmail.com](mailto:nabilahkhairunnisalala@gmail.com),

[putri.ra@unmuhjember.ac.id](mailto:putri.ra@unmuhjember.ac.id)

[itokwicaksono@unmuhjember.ac.id](mailto:itokwicaksono@unmuhjember.ac.id),

[baktiawannusanto@unmuhjember.ac.id](mailto:baktiawannusanto@unmuhjember.ac.id)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### ABSTRAK

Penelitian ini berjudul tentang Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini dilakukan di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, tepatnya di Kantor Desa Wringin dan Puskesmas Desa Wringin. Alasan penulis mengambil judul Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Desa Wringin dan lokasi di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ini adalah karena adanya faktor pengetahuan ibu dan kondisi perekonomian keluarga yang kurang bisa memenuhi dan memahami pentingnya gizi baik serta nutrisi di masa kehamilan dan balita sehingga menyebabkan masih terjadinya stunting di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Dalam penelitian didapat bahwa implementasi kebijakan penanganan stunting diimplementasikan melalui program-program seperti penyuluhan terkait pernikahan dini, pemerataan peningkatan akses sanitasi air bersih, dan pemberian makanan tambahan (PMT). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dan teori model

implementasi oleh Merilee S. Grindle dengan indikator isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Sehingga berdasarkan teori oleh Merilee S. Grindle isi kebijakan, kebijakan penanganan stunting di Desa Wringin menuju kepada ibu hamil, balita, remaja, dan keluarga miskin. Manfaatnya berupa pemenuhan gizi, peningkatan kualitas SDM pada pengetahuan mengenai pentingnya gizi. Perubahan yang diharapkan mencakup perilaku dan pola hidup sehat. Keputusan diambil oleh pemerintah desa, bekerja sama dengan Puskesmas dan bidan. Sumber daya yang digunakan mencakup tenaga kesehatan, dana desa, APBD, dan dukungan kelembagaan. Sedangkan pada sub lingkungan implementasi, hasil penelitian menunjukkan Pemdes dan Puskesmas Wringin berperan utama dalam penanganan stunting, dengan kekuasaan, strategi, dan kepentingan yang saling mendukung. Pemdes fokus pada kebijakan dan infrastruktur, Puskesmas pada pelayanan kesehatan. Keduanya responsif, dengan bidan aktif mendatangi warga sebagai bentuk kepatuhan dan kepedulian.

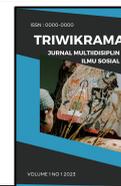
**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan ; Penanganan Stunting

### ABSTRACT

*This research is entitled Implementation of Stunting Handling Policy in Wringin Village, Wringin Sub-district, Bondowoso Regency. This research was conducted in Wringin Village, Wringin Subdistrict, Bondowoso Regency, precisely at the Wringin Village Office and Wringin Village Health Center. The reason the author took the title Implementation of Stunting Handling Policies in Wringin Village and the location in Wringin Village, Wringin Subdistrict, Bondowoso Regency is because there are factors of maternal knowledge and family economic conditions*

\*Corresponding author

E-mail addresses: [zukhrufi@gmail.com](mailto:zukhrufi@gmail.com)



*that are less able to fulfill and understand the importance of good nutrition and nutrition during pregnancy and toddlers, causing stunting to still occur in Wringin Village, Wringin Subdistrict, Bondowoso Regency. The research found that the implementation of stunting handling policies was implemented through programs such as counseling related to early marriage, equitable access to clean water sanitation, and provision of additional food (PMT). This study was conducted using qualitative methods and Merilee S. Grindle's implementation model theory with policy content and implementation environment indicators. Based on Merilee S. Grindle's theory, the content of the policy on stunting in Wringin Village is aimed at pregnant women, toddlers, adolescents, and poor families. The benefits include nutritional fulfillment and improved human resource quality in terms of knowledge about the importance of nutrition. The expected changes include healthy behaviors and lifestyles. Decisions are made by the village government in collaboration with the community health center and midwives. The resources used include health workers, village funds, the regional budget, and institutional support. Meanwhile, in the sub-implementation environment, the results of the study show that the village government and community health center in Wringin play a major role in addressing stunting, with mutually supportive power, strategies, and interests. The village government focuses on policies and infrastructure, while the Puskesmas focuses on health services. Both are responsive, with midwives actively visiting residents as a form of compliance and concern*

---

**Keywords:** Policy Implementation; Handling Stunting

## 1. PENDAHULUAN

Permasalahan stunting menjadi masalah yang terus diupayakan oleh pemerintah di Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk bisa mengurangi bahkan memberikan perhatian serius terhadap apa saja faktor penyebab dan penyelesaian dari kasus permasalahan stunting ini. Dengan adanya pernyataan tersebut dipastikan stunting menjadi ancaman serius terhadap pemerintah. Menurut data terbaru, anak Indonesia mengalami stunting sekitar 21,6%. Meskipun angka tersebut merupakan hasil penurunan dari tahun ke tahun sebelumnya, pemerintah saat ini menetapkan target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Desa-desa di Indonesia dengan prevalensi angka stunting yang tinggi menjadi faktor terhadap tingginya angka permasalahan kasus stunting di Indonesia.

Penyebab stunting di Indonesia dapat dikatakan beragam, salah satu faktor utamanya adalah kurangnya gizi pada ibu hamil dan bayi, ibu hamil yang tidak mendapatkan asupan nutrisi serta gizi yang cukup sehingga beresiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya stunting. Banyak keluarga di Indonesia yang memiliki keterbatasan terhadap makanan bergizi serta asupan gizi dikarenakan faktor ekonomi keluarga maupun ketidaktahuan mengenai pentingnya pola makan yang sehat dan seimbang. Selain itu, sanitasi yang buruk menjadi penyebab yang signifikan terhadap faktor terjadinya stunting di Indonesia. Di beberapa banyak daerah di Indonesia, akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang baik masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan adanya penyakit seperti diare pada anak-anak, yang menyebabkan status gizi mereka menjadi buruk. Keadaan tersebut diperparah dengan adanya pola asuh yang kurang tepat, seperti contoh pemberian MPASI (Makanan Pendamping Asi) yang tidak bernutrisi dan bergizi, serta penghentian ASI eksklusif sebelum waktunya. Hal tersebut tentu memperparah situasi sehingga stunting terus terjadi.

Anak dengan penderita stunting, menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Baik tantangan dengan jangka pendek maupun panjang. Dampak jangka pendek dari stunting adalah rentannya kondisi bayi terhadap penyakit, lemahnya imunitas, gangguan metabolisme, dan



pencernaan. Sedangkan dampak jangka panjang stunting adalah berkurangnya perkembangan kognitif dan fisik, berkurangnya aktivitas reproduksi, kondisi Kesehatan yang buruk, dan meningkatkan resiko penyakit degenerative (WHO 2014, dalam jurnal Ilham Nur Hanifa Maulana, 2021).

Dilihat dari faktor penyebab stunting pada anak di Indonesia adalah kurangnya gizi serta nutrisi yang cukup sejak bayi dalam kandungan ibu, ini berkaitan dengan kondisi perekonomian pada keluarga, terutama keluarga miskin di daerah-daerah dengan penyumbang angka presentase stunting terbanyak. Persoalan mengenai mengapa stunting bisa terus terjadi, tentunya berkaitan terhadap kesadaran masyarakat, minimnya pengetahuan, dan mempengaruhi faktor terjadinya stunting, Tingkat ekonomi keluarga akan menentukan kemampuannya dalam mencukupi gizi anak, memenuhi makanan sehat, dan kebiasaan untuk hidup sehat (Annisa Ananda T, et all 2024). Dalam menyikapi permasalahan stunting di Indonesia, tentu pemerintah perlu memperhatikan dan mengatasi apa saja penyebabnya secara detail. Selain masalah ekonomi, kurangnya pengetahuan masyarakat serta minimnya kesadaran dan hal lain yang berkaitan dan berpengaruh terhadap faktor terjadinya stunting adalah Pendidikan, SDM dan budaya pernikahan dini, terkhusus di daerah kecil di Indonesia yang memang sejak lama menjadi daerah dengan penyumbang stunting tertinggi. Bisa dikatakan stunting di daerah pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan (Onis 2019, dalam jurnal Adawiyah 2024).

Sumber daya manusia adalah faktor terpenting dan sebagai penentu daya saing pada sebuah bangsa. Sehingga agar dapat menjadi investasi berharga pada masa depan bangsa, maka pembangunan sumber daya manusia harus dibenahi dengan lebih baik, persoalan mengenai Pembangunan sumber daya manusia di Indonesia adalah stunting, dimana stunting merupakan kondisi gizi buruk pada anak yang menyebabkan anak mengalami penghambatan pada pertumbuhan fisik dan otaknya. Kondisi tersebut yang akan mempengaruhi tingkat kecerdasan, kemampuan kognitif dan Kesehatan anak di masa depan (Hari Nugroho, 2023).

Menurut Undang-undang Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Yang disahkan dan ditetapkan pada 5 agustus 2021. Undang-undang tersebut bertujuan terhadap percepatan penurunan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan mencapai target Pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Dibentuknya undang-undang tersebut merupakan bukti adanya harapan pemerintah terhadap kesuksesan penanganan kasus stunting di Indonesia. Kerjasama dan keterlibatan dari berbagai pihak sangat diperlukan, baik dari masyarakat, komunitas, dan pemerintah. Apabila pihak-pihak tersebut dapat saling mempengaruhi, maka mudah bagi negara kita untuk menciptakan generasi yang lebih cerdas, sehat, dan produktif.

Implementasi kebijakan merupakan proses keberlanjutan dari adanya perumusan masalah yang kemudian diidentifikasi dan dilaksanakan. Implementasi kebijakan terletak pada para pengambil Keputusan untuk melaksanakan tujuan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting karena terdapat proses penempatan kebijakan yang akan diberlakukan (Imurana dalam jurnal Anggara Setya Saputra et all, 2022). Kebijakan atau Keputusan yang dibuat oleh para aktor yang terlibat, akan menjadi tanggung jawab dalam menerapkan kebijakan tersebut pada masyarakat. Karakteristik, strategi, dan sumber daya aktor pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi, selain itu keterlibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi dan dukungan menjadi pelengkap dalam mencapai keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan.

Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis tertarik untuk menggali permasalahan mengenai faktor apa yang menjadikan stunting masih saja terjadi dengan rumusan masalah mengenai



bagaimana implementasi kebijakan penanganan stunting yang ada di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Sebagai salah satu dari sekian desa yang ada di Kabupaten Bondowoso, Desa Wringin merupakan desa yang turut berupaya dan membuat kebijakan sebagai penanganan terhadap permasalahan stunting. Kasus stunting yang hingga saat ini masih terus ada, menjadikan Desa Wringin sebagai desa dengan penyumbangan angka stunting di Kabupaten Bondowoso. Setiap isi penulisan skripsi yang penulis buat ini, penulis ingin memaparkan apa saja kebijakan pemerintah terhadap penanganan stunting di Desa Wringin dan bagaimana implementasi terhadap kebijakan stunting.

Pemerintah Desa Wringin dalam membuat kebijakan penanganan stunting telah menyesuaikan dengan faktor penyebab yang ada, aktor atau instansi lain yang berwenang turut berkontribusi dengan sangat baik dalam menangani permasalahan stunting. Dari pembahasan yang telah penulis jabarkan, Desa Wringin perlu dalam pemantauan mengenai kasus stunting. Meskipun tercatat secara data terus mengalami penurunan, Pemerintah Desa Wringin tetap selalu berupaya agar stunting menjadi permasalahan kesehatan yang tidak lagi mengkhawatirkan. Karena hingga pada saat ini kasus stunting masih saja ada dan terjadi meskipun angka prevalensi stunting di Desa Wringin terus mengalami penurunan. Data oleh Puskesmas Desa Wringin, terdapat 13 balita dengan indikasi stunting, sedangkan data oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, Desa Wringin menduduki rangking tertinggi ke 11 dengan jumlah 80 balita yang terindikasi stunting.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jabarkan, permasalahan mengenai bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan di Desa Wringin dan Pendidikan ibu terhadap pengetahuan mengenai pentingnya gizi pada anak balita dan dimasa kehamilan menjadi alasan utama yang spesifik untuk penulis melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso”. Penelitian ini juga memfokuskan mengenai apa saja kebijakan yang dibuat sebagai bentuk penanganan terhadap permasalahan stunting dan mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan penanganan stunting di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Di tinjau dengan teori model implementasi oleh Merilee S. Grindle, penelitian ini dilakukan dengan menyoroti dua aspek variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yang mencakup isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Teori Merilee S. Grindle***

Implementasi Kebijakan merupakan tindakan pengambilan keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah, melalui individu ataupun kelompok guna mencapai tujuan yang ditetapkan secara bersama dalam pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan merupakan proses penerapan kebijakan pada target sasaran yakni masyarakat. Kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila implementasi yang dilakukan berjalan dengan efektif dan penuh tanggung jawab. Merilee S. Grindle mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan keberhasilan akan dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Grindle juga menegaskan bahwa peran aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan merupakan hal yang penting, dimana kekuatan kepentingan dan juga strategi yang digunakan akan menentukan keefektifan dari adanya pelaksanaan implementasi kebijakan.

Teori Merilee S. Grindle menyoroti implementasi kebijakan dengan mempertimbangkan pada faktor-faktor internal yakni isi kebijakan dan eksternal yaitu lingkungan implementasi. Dalam hal ini teori Merilee S. Grindle komprehensif dalam memahami alasan bagaimana berhasil atau gagal suatu kebijakan. Dengan adanya penjelasan mengenai teori Merilee S. Grindle ini yang



mendasari penelitian penulis mengenai bagaimana implementasi kebijakan penanganan stunting yang ada di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, dimana penelitian ini mengacu pada bagaimana isi dari kebijakan dalam penanganan stunting dan bagaimana peran antar kepentingan serta sejauh mana kebijakan yang dibuat mencerminkan permasalahan yang ada.

## 2. METODE

Metode penelitian merupakan prosedur yang bersifat sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data yang berguna dalam menjawab pertanyaan dalam proses penelitian agar menghasilkan data yang valid dan penelitian dapat berjalan secara sistematis sehingga menghasilkan data yang akurat bersifat kredibel.

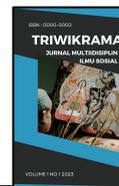
### Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis berarah pada penelitian kualitatif, dimana penelitian dilakukan melalui pendekatan yang berfokus pada pemahaman tentang fenomena sosial melalui pengumpulan data seperti wawancara. Penelitian dilakukan dengan maksud mengetahui kondisi sosial dari adanya permasalahan stunting di Desa Wringin. Melakukan observasi dan wawancara menjadi pedoman dalam memperoleh informasi sebagai penangkap dalam tulisan penelitian baik dalam bentuk data atau tulisan. Penelitian yang tertulis dalam skripsi ini adalah penelitian yang meneliti bagaimana proses implementasi kebijakan penanganan stunting di Desa Wringin, Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Di mulai dari mengapa adanya kebijakan di bentuk sampai pada bagaimana proses penerapan kebijakan dan melalui tindakan dalam bentuk apa agar kebijakan yang dibuat dapat berakhir sesuai dengan tujuan dan keinginan. Metode penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dengan melakukan analisis mendalam. Pada penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan secara rinci, jelas serta lengkap untuk menjelaskan fenomena berbagai kehidupan masyarakat termasuk masalah yang ada di dalamnya.

Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada eksplorasi secara mendalam terhadap fenomena sosial dan perilaku manusia. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif merupakan proses memahami fenomena berdasarkan perspektif individu atau kelompok dalam konteks alami mereka. Denzim dan Lincoln (2005) mengatakan bahwa penelitian kualitatif terlibat pada interpretasi yang kaya terhadap data non-numerik seperti observasi, wawancara dan dokumentasi dengan tujuan memahami makna di balik perilaku serta pengalaman. Selain itu menurut Bogdan dan Biklen (1992) penelitian kualitatif didefinisikan sebagai upaya dalam menggambarkan realitas yang mendalam melalui pengamatan langsung, tanpa adanya intervensi yang signifikan dari peneliti. Patton (2002) menegaskan bahwasannya pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam memahami kompleksitas serta dinamika yang terdapat pada suatu fenomena. Singkatnya, secara umum penelitian kualitatif memiliki tujuan dalam menggali pemahaman secara mendalam dan holistik, dengan memprioritaskan konteks dan subjektivitas dari sumber data yang telah di dapat.

### Sumber Data

Sumber data merupakan data yang di dapat oleh peneliti melalui data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dapat diperoleh peneliti melalui sumber pertama seperti wawancara atau observasi. Sedangkan data sekunder merupakan data yang di dapat oleh peneliti melalui sumber yang tidak secara langsung seperti jurnal atau artikel, dan sumber informasi yang tersedia di internet.



Pada penelitian ini, data didapat melalui wawancara kepada informan serta melakukan observasi secara langsung pada tempat dan mendapat informasi melalui internet. Peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa mengenai kebijakan desa dalam penanganan stunting dan wawancara kepada pihak puskesmas yang diwakilkan oleh seorang bidan, serta pihak lain yang berkontribusi dalam penyediaan data.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

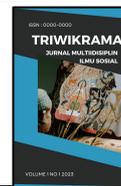
#### Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Implementasi merupakan proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan, rencana atau keputusan yang telah dibuat demi mencapai tujuan. Implementasi kebijakan diperlukan karena adanya keharusan implementasi pada setiap kebijakan yang telah di buat. Menurut *Merilee S. Grindle* implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks yang dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya. Sedangkan ciri -ciri implementasi melibatkan pelaksana dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya. Untuk alasan mengapa diperlukan implementasi kebijakan menurut *Grindle 1980 dan Quade 1984 dalam jurnal Guru Besar Ilmu Administrasi UNM 2010* ialah implementasi kebijakan diperlukan agar dapat ditunjukkan konfigurasi dan sinergi dari tiga variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni kebijakan, organisasi, dan lingkungan kebijakan.

Dalam Implementasi Kebijakan penanganan stunting yang ada di Desa Wringin, Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso telah melibatkan beberapa pihak, baik pihak instansi yang memiliki kewenangan dalam proses pembuatan kebijakan hingga pada proses implementasi kebijakan serta pihak masyarakat. Diantara pihak - pihak tersebut ialah Pemerintah Desa Wringin, Puskesmas Desa Wringin, dan Masyarakat Desa Wringin. Aktor - aktor yang terlibat tersebut memiliki kewenangan serta kepentingan peran sesuai dengan tugas dan kewajibannya, di mulai dari tahap perencanaan hingga pada proses implementasi.

Desa Wringin menjadi salah satu desa yang ada di Kecamatan Wringin dan Kabupaten Bondowoso yang turut menerapkan kebijakan stunting. Kebijakan penanganan stunting yang dibuat oleh pemerintah Desa Wringin seperti kebijakan mengenai pernikahan dini, sanitasi air bersih, dan pemberian makanan tambahan (PMT). Sebagai salah satu dari sekian desa dengan permasalahan stunting yang sama, Pemerintah Desa Wringin telah berkontribusi dengan membuat kebijakan penanganan stunting melalui berbagai cara seperti program kesehatan stunting dan membuat kebijakan penanggulangan stunting yang melibatkan puskesmas setempat dan masyarakat. Desa wringin tidak luput sebagai desa dengan penyumbang angka stunting yang ada di Kabupaten Bondowoso. Meskipun dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, berbagai program pencegahan dan kebijakan mengenai masalah stunting masih terus berlaku. Desa Wringin berupaya untuk mengalokasikan anggaran dana untuk berbagai upaya pencegahan stunting. Dimulai dari adanya pengadaan program serta penyuluhan mengenai pernikahan dini dan pentingnya gizi baik pada anak dan ibu hamil.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Wringin adalah bentuk kepedulian tentang adanya permasalahan stunting. Berbagai upaya yang ada melibatkan banyak pihak yang turut berkontribusi dalam mencapai keberhasilan kebijakan sesuai dengan tujuan, keikutsertaan dan kesadaran masyarakat Desa Wringin terhadap stunting juga diperlukan agar kebijakan dapat diterapkan secara efisien. Kebijakan yang di buat oleh Pemdes Wringin memuat banyak sekali kepedulian pada anak remaja, ibu hamil, dan balita.

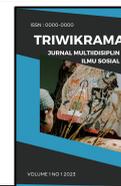


Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh *Merilee S. Grindle* tentang implementasi kebijakan ialah keberhasilan implementasi yang dipengaruhi oleh dua variabel utama, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Isi kebijakan yang dimaksud ialah tujuan dan manfaat, kelompok sasaran, sumber daya yang ada, serta karakteristik dan strategi pelaksanaannya. Komponen - komponen tersebut tentunya memuat dari adanya kepentingan kebijakan serta untuk siapa kebijakan tersebut dibuat. Lingkungan kebijakan meliputi lingkungan sosial dan ekonomi, komitmen dan dukungan, serta koordinasi antar instansi. Teori ini menekankan bahwa bagaimana isi dari kebijakan yang dibuat begitu kontras dengan lingkungan implementasi. Diperlukan adanya koordinasi kuat dari berbagai instansi yang berkewenangan dan partisipasi masyarakat terhadap proses implementasi kebijakan. Grindle mengatakan bagaimana isi kebijakan dan lingkungan implementasi menentukan keberhasilan yang sesuai dengan tujuan.

Hasil Penelitian menjelaskan bahwa implementasi kebijakan penanganan stunting di Desa Wringin dimulai dari adanya pembuatan kebijakan oleh Kepala Desa yang tentunya dalam proses hingga pada hasil kebijakan ditinjau oleh banyak faktor penyebab seperti adanya budaya pernikahan dini yang masih saja terjadi, sanitasi air yang tidak merata karena adanya faktor lingkungan sebagai penghambat dan yang paling mempengaruhi adalah kondisi perekonomian keluarga yang tidak mencukupi gizi baik pada ibu hamil dan balita serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya gizi baik. Kemudian, ketika kebijakan telah mencapai final ketetapan maka puskesmas adalah aktor atau pihak kedua yang menjalani tugas dan kewajiban dalam mengimplementasikan kebijakan melalui program serta pelayanan kesehatan pada masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama dengan sekretaris kantor Desa Wringin, yakni Bapak Didik Rahman, beliau menjelaskan bahwa dalam menjalani setiap kegiatan pelayanan pada masyarakat terhadap permasalahan stunting, puskesmas senantiasa bersama sama dengan babinsa serta kepala dusun setempat dan masyarakat lain melakukan pendampingan dan pemantauan pada setiap ibu hamil dan anak balita yang mungkin secara pemahaman diperlukan perhatian lebih. Dalam melakukan pendampingan, pihak yang mewakili puskesmas atau bidan yang bertugas bersama dengan babinsa melakukan pendekatan bertahap pada masyarakat yang bersangkutan agar tidak timbul rasa kurang nyaman.

Implementasi kebijakan penanganan stunting di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dilakukan dengan melibatkan kolaborasi seperti puskesmas, pemerintah desa, dinas kesehatan serta dp3akb sebagai institusi yang berkontribusi sebagai penyaluran bantuan pangan bergizi dalam program pemberian makanan tambahan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso tidak hanya berperan sebagai pelaksana dalam program PMT, tetapi juga terlibat dalam pendanaan melalui pengelolaan dana oleh Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Pemberian makanan tambahan ini berupa susu formula atau bentuk makanan yang bernilai gizi dan nutrisi cukup. Program PMT ini dilakukan ketika bidan sebagai pihak perwakilan puskesmas mengadakan posyandu, selain itu untuk ibu hamil dan balita yang secara lokasi tempat tinggal dan juga sumber daya pengetahuan rendah, bidan bersama dengan kepala desa akan mendatangi secara langsung ibu hamil atau balita yang terdampak stunting. Dari adanya penjabaran ini, dikatakan bahwa implementasi kebijakan penanganan stunting di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso berjalan dengan baik, adanya penurunan angka prevalensi stunting di Desa Wringin menjadi bukti nyata keberhasilan implementasi kebijakan penanganan stunting di Desa Wringin.



## 4. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

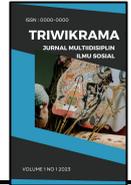
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso telah diupayakan dengan sangat optimal, didukung oleh kerja sama erat antara pihak desa, Puskesmas dan Masyarakat. Tetapi kendala dalam proses implementasi masih ditemukan, seperti minimnya sumber daya manusia, budaya pernikahan dini, serta keadaan sosial masyarakat yang kurang mendukung.

Meski mengalami penurunan angka prevalensi, Pemerintah Desa Wringin dan Puskesmas Desa Wringin tetap melakukan upaya berkelanjutan melalui program - program yang telah di buat. Penurunan angka stunting yang terjadi menjadikan penanganan stunting di Desa Wringin lebih komprehensif pada pencegahan stunting. Pernikahan dini bukan menjadi faktor utama terjadinya stunting, bukan pula menjadi penghambat keberhasilan kebijakan penanganan stunting. Karna berdasarkan pemaparan yang telah penulis jabarkan di atas, pernikahan terus mengalami penurunan pesat meskipun masih saja terjadi setidaknya satu pasangan dalam setahun yang mengajukan pernikahan di bawah umur ketentuan. Sumber daya masyarakat, dan kondisi sosial adalah faktor yang paling mempengaruhi kendala pada proses implementasi kebijakan penanganan stunting di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Pada pandangan teori menurut Grindle, implementasi kebijakan harus didasarkan pada konteks sumber daya manusia maupun finansial, strategi pelaksana program dan konteks implementasi pada kepatuhan dan kepentingan. Dalam implementasi kebijakan penanganan stunting di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Wringin dan puskesmas Desa Wringin cukup aktif, tanggap dan responsif pada setiap permasalahan dan pelaksana program penanganan stunting. Adanya partisipasi dan kepatuhan masyarakat khususnya ibu hamil, balita dan anak remaja terhadap kebijakan menjadi penunjang keberhasilan implementasi kebijakan penanganan stunting yang ada di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Meski adanya kualitas sumber daya pengetahuan ibu dan keluarga terkait pentingnya gizi dan kondisi sosial yang tidak mendukung menjadikan pemerintah Desa Wringin merencanakan strategi peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa Wringin pada upaya pemerataan sanitasi air bersih.

Kolaborasi baik antar instansi puskesmas dan pemerintah Desa Wringin, menunjukkan koordinasi dan komunikasi yang sesuai dengan harapan. Pemerintah Desa Wringin sebagai pihak dengan tanggung jawab dalam keputusan kebijakan, pelaksana kebijakan, pengelolaan anggaran, serta pembuat strategi dan puskesmas sebagai peran yang berkarakteristik profesional dan fungsional menjadikan implementasi kebijakan penanganan stunting terlaksana berdasarkan pemahaman teori implementasi oleh Grindle oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dan anggaran oleh pemerintah Desa Wringin cukup berkontribusi dengan baik pada kecukupan sumber daya finansial. Kondisi permasalahan stunting yang terjadi di Desa Wringin.

Program pemberian makanan tambahan (PMT) secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian, telah terimplementasi dengan cukup baik. Anggaran yang dialokasikan sebelum adanya program pemberian makanan tambahan (PMT) cukup berdampak pada peningkatan angka prevalensi stunting yang ada di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso. Sedangkan setelah diimplementasikan kebijakan mengenai program PMT, angka prevalensi stunting yang terjadi di Desa Wringin mengalami perubahan yang baik pada penurunan jumlah balita yang terindikasi stunting, selain itu keluarga miskin dan ibu hamil yang tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi dan



nutrisi karena faktor ekonomi dan pemahaman yang minim sangat terbantu. Adanya program pemberian makanan tambahan atau PMT yang diimplementasikan langsung kepada masyarakat terutama ibu hamil dan balita dapat dikatakan sangat berkontribusi terhadap penurunan angka prevalensi stunting yang terjadi di Desa Wringin. Terakhir, partisipasi dan keikutsertaan aktif pada masyarakat menutup kendala sumber daya pengetahuan dan kondisi perekonomian mereka, dimana kontribusi masyarakat terhadap dukungan keberhasilan kebijakan sangat berpengaruh pada penurunan angka prevalensi stunting di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

### Saran

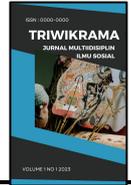
Dari hasil pembahasan serta kesimpulan yang telah penulis jabarkan dalam uraian di atas, saran yang perlu untuk Pemerintah Desa Wringin lakukan ialah meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Desa Wringin, dengan peningkatan kesejahteraan hidup sosial masyarakat, kehidupan sosial akan sejalan dengan kualitas sumber daya manusia. Kehidupan yang layak akan mendorong kelengkapan nutrisi, gizi serta kesehatan fisik dan mental. Dengan adanya kondisi sosial yang baik, masalah kesehatan terutama stunting akan terhindar pada generasi penerus.

Kesadaran dan pengetahuan perlu untuk ditingkatkan dalam diri setiap masyarakat. Pada ibu hamil perlu peningkatan kualitas sumber daya pengetahuan diri terkait pentingnya gizi semasa kehamilan, gizi pada anak, dan pemahaman mengenai masa pertumbuhan anak. Dalam hal ini, pendidikan menjadi aspek penting dalam penentu kualitas kehidupan baik dari segi kesehatan dan kesejahteraan hidup, pendidikan diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya Pendidikan yang baik, pengetahuan akan tersimpan secara otomatis pada kualitas sumber daya manusia. Stunting sangat berkaitan dengan Pendidikan dan kesadaran, maka kunci dalam keberhasilan penanganan dan pencegahan stunting adalah pendidikan ibu yang baik, hal ini dikarenakan Pendidikan ibu berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai gizi pada anak, perawatan tumbuh kembang anak, serta kemudahan dalam mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik.

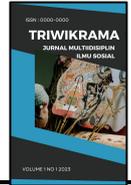
Pada konteks pemahaman teori Grindle Pemerintah Desa Wringin selain penindakan pemerataan sanitasi air bersih sebagai upaya strategi peningkatan kualitas hidup masyarakat, perlu juga dalam membuat strategi pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bagaimana menjalankan kehidupan yang sejalan dengan pemahaman mengenai kesehatan manusia terkhusus mengenai stunting. motivasi penuh dalam mendapatkan kehidupan yang lebih layak dari ekonomi akan memudahkan keluarga dalam pemenuhan gizi dan nutrisi terhadap ibu hamil anak balita mereka. Teori Grindle pada sub strategi memang sudah cukup baik terkonsep pada hasil penelitian ini, terbukti dari adanya strategi peningkatan pemerataan air bersih sebagai harapan kualitas hidup masyarakat Desa Wringin yang lebih baik, akan lebih baik pula apabila strategi lebih di kembangkan pada aspek peningkatan ekonomi, pengetahuan, dan kondisi perekonomian keluarga.

### 5. DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, M. S., & Maulana, A. (2024). Evaluasi Program Rumah Desa Sehat (Rds) Dalam Pencegahan Stunting i Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(6), 21-30.



- Abdillah, S., Angin, R., & Adawiyah, P. R. (2024). Strategi Pemerintah Desa dalam Penanganan Stunting di Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. *Buletin Antropologi Indonesia*, 1(1), 10-10.
- Adawiyah, P. R. (2022). Inovasi Program Ruang Rindu (Ruang Pemberdayaan Dan Perlindungan Ibu-Anak) Untuk Perempuan Korban KDRT Dan Penurunan Aki Dan AKB Di Kabupaten Banyuwangi. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(4), 562-571.
- Amir, N., & Djokosujono, K. (2019). Faktor-faktor yang berhubungan dengan konsumsi tablet tambah darah (TTD) pada remaja putri di Indonesia: Literature review. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 15(2), 119-129.
- Anasa, T. Y. (2023). *Implementasi Program Pencegahan Stunting Di Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala* (Doctoral dissertation, Universitas Tadulako).
- Angin, R. (2024). 4464 Words. *American Journal of Public Law and Political Education*, 98, 107.
- Ayuni, I. L., & Jakaria, M. H. D. (2021). Pendidikan Terhadap Siswa Ditengah Pandemi Serta Pentingnya Menjaga Protokol Kesehatan Covid-19 Di Desa Wringin Bondowoso. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 2(1), 56-62.
- Azizah, F. N., & Kholifah, E. (2025). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana (dp3akb) Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Jember. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(2), 61-70.
- Dandi, M., & Harahap, A. (2024). Implementasi Kebijakan Program Penurunan Stunting Di Desa Juru Banu Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur. *Japb*, 7(1), 486-502.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83.
- Hadina, H., Hadriani, H., Muliani, M., & Batjo, S. H. (2022). Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting. *Faletehan Health Journal*, 9(02), 176-184.
- Handayani, L., & Ma'ruf, N. A. (2010). Peran tenaga kesehatan sebagai pelaksana pelayanan kesehatan puskesmas. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 13(1), 21298.
- Hidayat, A. (2023). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 6(2), 524-532.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Pada Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting
- Kholifah, E., Angin, R., Adawiyah, P. R., Sos, S., Susanti, A., Kom, M. M., & Press, L. P. P. M. Penguatan Komunitas Lokal Menghadapi Era Global.
- Maulana, I. N. H. Implementasi Kebijakan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Upaya Pencegahan Stunting.
- Nor'Aini, Y., & Lathifah, U. (2024). Penyuluhan Pemanfaatan Tablet Tambah Darah Sebagai Deteksi Dini Pencegahan Stunting Pada Remaja Putri Di SMP Negeri 1 Nalumsari. *Hikmah Journal of Community Service*, 2(1), 29-33.
- Nugroho, H. (2023). Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Desa Tamansari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. *Public Policy and Management Inquiry*, 7(1), 651-656.
- Nuramalia, S., Dedi, A., & Yuliani, D. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting oleh Desa Saguling Kecamatan Baregbe Kabupaten Ciamis.
- Olo, A., Mediani, H. S., & Rakhmawati, W. (2021). Hubungan Faktor Air dan Sanitasi dengan Kejadian Stunting pada Balita di Indonesia. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1113-1126.
- Pamangin, L. O. M. (2023). Perilaku konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri. *Jurnal Promotif Preventif*, 6(2), 311-317.



- Siahaya, A., & Tahapary, W. (2024). Pentingnya Konsumsi Tablet Tambah Darah (Fe) dan Pelatihan Gizi Seimbang Pada Remaja Putri Untuk Pencegahan Stunting Sejak Dini. *Karya Kesehatan Siwalima*, 3(1), 8-15.
- Usman, S., & Ramdhan, S. (2021). Hubungan Faktor Pemberian ASI Eksklusif dengan Kejadian Stunting Pada Anak Balita. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 10(1), 285-289.
- Wafa, A., Siswanto, E., Angin, R., & Adawiyah, P. R. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Kualitas Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Panduman Tahun 2020-2025. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 6(4), 427-439.
- Wididiati, P., Nurcahyanto, H., & Marom, A. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Di Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek). *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(4), 379-394.
- Widyawati, E., & Sudaryanti, S. (2022). Responsivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dalam Upaya Mengurangi Angka Stunting pada Balita. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 2(1), 108-123.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bondowoso.